



Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa

Portrait of Religious Moderation Among Students

Muhammad Khairul Rijal

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin Samarinda Seberang
Email: rijalforza@gmail.com

Muhammad Nasir

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin Samarinda Seberang
Email: muhammadnasir@iain-samarinda.ac.id

Fathur Rahman

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin Samarinda Seberang
Email: faturdocument@gmail.com/

Info Artikel	Abstract
Diterima 5 Maret 2022	Diskursus tentang radikalisme agama di kalangan generasi muda Indonesia disinyalir semakin meningkat di era digital saat ini. Dalam konteks keagamaan, radikalisme agama dapat dimaknai sebagai fanatik terhadap suatu pendapat sehingga menolak pendapat orang lain, menutup pintu dialog dan mudah mengkafirkan kelompok yang berbeda paham dengan diri atau kelompoknya, serta pemahaman agama yang tekstual tanpa melihat dan mempertimbangkan esensi syariat (<i>maqasid al-syari'ah</i>). Radikalisme agama berawal dari cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang eksklusif. Oleh karena itu konsep moderat atau ' <i>wasatiyyah</i> ' sudah seharusnya menjadi landasan dalam kebijakan untuk melawan narasi radikal beragama. Moderasi beragama akan mampu menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potret pemahaman moderasi beragama aktivis mahasiswa Kalimantan Timur sebagai respons atas meningkatnya pola pikir radikal dalam beragama di kalangan mahasiswa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Data diolah dengan metode <i>clustering</i> dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk grafik dan naratif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di kalangan aktivis mahasiswa yang aktif berorganisasi, 57% menyatakan paham terkait moderasi beragama dan terdapat 43% yang belum paham memahaminya. Selain itu, masih ditemukan pola pikir yang mengarah kepada pola pikir eksklusif dan dapat menumbuhkan sikap ekstrem dan radikal dalam beragama, terutama dalam aspek wawasan keberagamaan yang meliputi penerimaan terhadap budaya, dan mudah menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dari amalan kelompoknya. Pemerintah dalam hal ini para <i>stakeholder</i> yang berkepentingan diharapkan mampu memfasilitasi penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya
Revisi I 27 April 2022	
Revisi II 14 Mei 2022	
Disetujui 30 Mei 2022	

untuk mencegah lahirnya pola pikir, sikap, dan perilaku yang mengarah kepada radikalisme agama.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Radikalisme Agama, Aktivis Mahasiswa*

The discourse on religious radicalism among Indonesia's younger generation is increasing. In a religious context, religious radicalism can be interpreted as being fanatical about an opinion and rejecting the views of others, does not give a chance for discussion, and easy to blame other people who have different views from himself or his group, as well as a textual understanding of religion without seeing and considering the essence of the Shari'a (*maqasid al-shari'ah*). Religious radicalism begins with an exclusive perspective, attitude, and religious behaviour. Therefore the concept of moderation or '*wasatiyyah*' should be the basis of policies to fight religious radical narratives. Religious moderation will be able to unify the religious spirit and national commitment. This study aims to describe the understanding of religious moderation of college student activists in East Kalimantan as a response to the increasing radical mindset in religion among college students. The research approach used is a descriptive quantitative approach. The data processed by the clustering method were analyzed descriptively and presented in the form of graphs and narratives. The findings of this study indicate that among college student activists who are active in organizations, 57% state that they understand religious moderation and 43% do not understand religious moderation. In addition, there is still a mindset that leads to an exclusive mindset and can foster extreme and radical attitudes in religion, especially in the aspect of religious insight which includes acceptance of culture, and it is easy to blame religious practices that are different from his practice. The government, in this case, the interested stakeholders, is expected to be able to facilitate the strengthening of religious moderation among students as part of efforts to prevent the birth of mindsets, attitudes, and behaviours that lead to religious radicalism.

Keywords: *Religious Moderation, Religious Radicalism, College Student Activists*

PENDAHULUAN

Banyak kalangan melihat Indonesia sebagai negara yang mampu menghadirkan kehidupan antar umat beragama yang toleran dan rukun serta mampu menjaga kemajemukan dari perpecahan akibat konflik sosial keagamaan (Menchik, 2016). Namun seiring berjalannya waktu, tantangan dan problematika kehidupan keagamaan di Indonesia belakangan ini eskalasinya makin meningkat. Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila dan penduduk muslim terbesar di dunia adalah negara yang telah berhasil menuju transisi demokrasi dengan masyarakat mayoritas muslim terbesar, namun di samping itu, Indonesia juga

dapat menjadi preseden buruk berkembangnya radikalisme agama dan intoleransi dalam bingkai demokrasi (Hadiz, 2016). Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dan berpendapat terutama dalam konteks kehidupan sosial beragama harus dijaga dan diatur agar tidak berpotensi menimbulkan konflik. Azyumardi Azra berpendapat lahirnya kelompok radikal di Indonesia disebabkan oleh euforia demokrasi, sehingga memberikan ruang bebas bagi kelompok ekstremis untuk mengekspresikan gagasan dan aktivitas mereka (Azra, 2003). Paling tidak pasca rezim orde baru tahun 1998, dan bersamaan dimulainya masa reformasi, turut bermunculan di banyak daerah di

Indonesia berbagai konflik bernuansa sosial keagamaan. Hal ini dipicu oleh cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang eksklusif dan berujung pada kekerasan (Sukma, 2005)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan radikalisme sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis (Depdikbud, 2021). Sartono Kartodirdjo mendefinisikan radikalisme sebagai aksi penolakan berbasis gerakan sosial terhadap tata tertib sosial yang berlaku yang dipengaruhi oleh dorongan kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan pihak yang memiliki suatu keistimewaan atau yang sedang berkuasa (Kartodirdjo, 1985). Dalam konteks keagamaan, radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berbasis keagamaan yang berupaya untuk melakukan perubahan secara total tatanan sosial dan politik yang ada melalui pendekatan kekerasan (Ahmad Rubaidi, 2007). Selain itu, radikalisme agama juga mengalami pergeseran makna dan perluasan definisi seperti fanatik terhadap suatu pendapat sehingga menolak pendapat orang lain, menutup pintu dialog serta mudah mengkafirkan kelompok yang berbeda paham dengan diri atau kelompoknya, dan pemahaman agama yang tekstual tanpa melihat dan mempertimbangkan esensi syariat (*maqasid al-syari'ah*) (Irwan Masduqi, 2012). Definisi terakhir inilah yang penulis maksud dalam radikalisme agama dalam tulisan ini. Radikalisme agama berawal dari

cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang eksklusif melihat kelompok lain yang berbeda sebagai musuh dan lawan, serta menutup jalur dialog dalam menyelesaikan masalah. Sikap seperti ini, pada akhirnya akan menggerus komitmen kebangsaan kita yang dibangun di atas fondasi kemajemukan dan kebhinekaan serta permusyawaratan dan gotong royong. Begitu juga dengan wawasan dan pemahaman keagamaan secara tekstual disinyalir memberikan pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku sebagian kelompok umat beragama di Indonesia sehingga mudah mengkafirkan kelompok yang berbeda di luar diri dan kelompoknya yang akhirnya memicu radikalisme agama.

Diskursus tentang radikalisme agama semakin menarik terutama radikalisme agama di kalangan generasi muda Indonesia yang diyakini semakin meningkat di era digital saat ini. Generasi muda yang disebut oleh Natana J. DeLong-Bas (2012) sebagai “generasi Facebook” atau “generasi internet” disebabkan masifnya penggunaan media sosial (*social media*) oleh generasi muda sebagai sarana kampanye dan mobilisasi dalam menuntut perubahan dibanyak negara (Azca, 2013). Arus informasi dan penyebaran paham keagamaan yang masif melalui media sosial saat ini, banyak berpengaruh terhadap pemahaman keagamaan generasi muda sebagai pengguna media sosial. Hal ini menyebabkan fenomena radikalisme agama saat ini memiliki corak lintas

negara, lintas budaya, dan lintas sejarah (Syafii et al., 2013). Menelaah studi terdahulu, ditemukan bahwa radikalisme agama di kalangan generasi muda Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor psikologis, suasana politik baik di dalam maupun di luar negeri, figur karismatik, dan pemahaman teks keagamaan (Usman et al., 2014). Radikalisme agama dipengaruhi juga oleh pandangan teologis & doktrin, sikap dan perilaku keagamaan, lingkungan sosio kultural, serta pengaruh dari pemuka agama (Ali Maksum, 2011). Selain itu, generasi muda disinyalir rentan mengalami 'krisis identitas' (*identity crisis*) yang oleh pakar psikologi Erik H. Erikson (1968) dijelaskan sebagai sebuah fase transisi dari masa kanak-kanak (*childhood*) menuju ke fase dewasa (*adulthood*) (Erikson, 1968). Dalam fase ini, generasi muda akan mencari jati dirinya, mencari *role model*-nya, sehingga sangat rentan terhadap pengaruh dari luar dirinya. Selain itu kesehatan mental generasi muda juga sangat rentan terhadap guncangan jiwa (*depression*) akibat berbagai persoalan hidup (Mc. Cullough and Timothy Smith, 2003). Ketika mengalami depresi akibat persoalan hidup, biasanya mereka akan lari kepada agama. Keliru dalam memahami ajaran suatu agama, maka akan dapat memicu cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang eksklusif dan mengarah kepada radikalisme agama.

Radikalisme agama merupakan sikap dan perilaku keagamaan yang dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya adalah sebagai berikut: 1) intoleran dan tidak menghargai pendapat orang lain; 2) fanatik berlebihan dan merasa selalu benar dan yang lain selalu salah; 3) eksklusivisme dengan merasa cara beragamanya yang paling benar; 4) sikap revolusioner dengan pendekatan kekerasan dalam mencapai tujuan (Rahimi Sabirin, 2004). Menurut Harun Nasution, lahirnya radikalisme agama disebabkan cara pandang eksklusif akibat tidak dapat membedakan antara agama dan keberagamaan. Agama bersifat mutlak, sedangkan keberagamaan bersifat nisbi, artinya kebenaran dalam keberagamaan masih membuka peluang bagi hadirnya kebenaran yang lainnya (Harun Nasution, 1992).

Faktor pemicu munculnya gerakan radikalisme dapat bersumber dari faktor ideologi dan non-ideologi. Faktor non ideologi misalnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perasaan dendam, sakit hati, ketidakpercayaan dan lain sebagainya (Saifuddin, 2017). Di kalangan mahasiswa, perkembangan radikalisme sangat dipengaruhi oleh faktor ideologi. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, mahasiswa sebagai '*agent of change*' memiliki akses kepada berbagai organisasi baik bersifat internal maupun eksternal kampus dalam skala nasional bahkan transnasional. Organisasi-organisasi tersebut bisa saja berafiliasi kepada suatu kelompok keagamaan

yang intoleransi, tidak akomodatif terhadap kebudayaan lokal, menggunakan pendekatan kekerasan dan tidak memiliki komitmen kebangsaan. Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait radikalisme dan paham keagamaan di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa yang hanya mengikuti organisasi internal kampus memiliki kecenderungan pola pikir yang tidak radikal, seperti; menghargai pemeluk agama lain, menerima pemimpin yang berbeda keyakinan, mengakui ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta menghindari sikap kekerasan dan arogansi beragama (Basri & Dwiningrum, 2019). Itu berarti mahasiswa yang aktif di organisasi eksternal kampus cenderung lebih berpeluang untuk memiliki pemahaman dan pola pikir radikal dalam beragama. Namun yang menjadi salah satu permasalahan saat ini adalah terbenturnya kegiatan keagamaan mahasiswa melalui organisasi internal yang terhalang oleh regulasi dan kebijakan institusi (Hadziq, 2019).

Moderasi adalah serangkaian tindakan kultural yang berorientasi pada perdamaian dan keseimbangan untuk merespons perubahan dan perbedaan identitas, baik agama maupun entitas kebudayaan (Idham, 2019). Konsep moderat atau ‘*wasatiyyah*’ sudah seharusnya menjadi landasan dalam kebijakan untuk melawan narasi radikal beragama (Aslam & Gunaratna, 2019) tak terkecuali dalam institusi perguruan

tinggi. Moderasi beragama adalah solusi konkrit untuk Indonesia yang merupakan negara majemuk dan religius. Keseimbangan antara semangat kebangsaan dan kemerdekaan beragama harus dijaga oleh seluruh komponen anak bangsa terlebih lagi di kalangan mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Moderasi beragama akan mampu menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen kebangsaan (Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama, 2021). Kehidupan keberagamaan dan berkebangsaan yang harmonis, damai, toleran, saling menghargai akan terwujud melalui moderasi beragama yang harus terus dikampanyekan di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita melihat Kementerian Agama terus menyuarakan wacana moderasi beragama sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan wacana keagamaan yang damai (Nasir & Rijal, 2021). Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mata kuliah moderasi beragama menjadi matakuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Ini menunjukkan komitmen yang kuat para *stakeholder* dan pihak terkait untuk melakukan proses internalisasi nilai-nilai moderasi dalam beragama kepada para mahasiswa. Beberapa penelitian terkait moderasi beragama bertujuan untuk membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi moderasi beragama, toleransi, perdamaian, dan berusaha untuk melawan stigma negatif sebagai agama teroris (Gillum, 2018).

Secara etimologi moderasi berasal dari bahasa arab yaitu *wasath* atau *wasathiyah*, semakna dengan kata *tawassuth* yang artinya ditengah-tengah, kata *wasath* atau *wasathiyah* sepadan dengan kata *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Sedangkan dalam bahasa latin, moderasi (*moderatio*) memiliki makna kesedang-an artinya tidak berlebihan dan tidak kekurangan, atau dapat juga dimaknai dengan penguasaan diri. (Kementerian Agama, 2019) Menurut Hashim Kamali kata *moderate* identik dengan dua kata kunci yaitu berimbang (*balance*), dan adil (*justice*) (Kamali, Hashim, 2015). Secara terminologi moderasi Islam merupakan suatu ajaran Islam yang berprinsip pada nir-kekerasan (anti kekerasan) dan lebih memilih jalan tengah dalam menyikapi suatu permasalahan. Titik penekanan dalam moderasi Islam adalah pada persatuan dan kesatuan umat (Yusuf, 2018). Lukman Hakim Saifuddin memaknai moderat dalam beragama sebagai kemampuan seseorang untuk bisa berbagi tentang arti kebenaran selama hal tersebut sesuai dengan tafsir agama dan selama tidak terjadi penyimpangan, meyakini esensi ajaran agama yang dianut, dan menegakkan prinsip adil dan berimbang. Moderat dalam beragama akan melahirkan toleransi antar umat beragama yang terjalin dengan harmonis. (Eunike & Putrawan, 2021)

Berdasarkan paparan di atas, penting untuk melakukan penggambaran moderasi beragama di

kalangan mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur sebagai bagian dari refleksi dan reaksi fenomena radikalisme agama yang dirasa semakin meningkat dikalangan mahasiswa. Hasil kajian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *stakeholder* dan pihak terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama dan radikalisme agama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif deskriptif. Responden pada penelitian ini merupakan mahasiswa di lima perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur yang berjumlah 360 mahasiswa dan mereka aktif dalam keorganisasian mahasiswa baik internal maupun eksternal kampus. Data dikumpulkan melalui survei dengan mendistribusikan instrumen penelitian berupa kuesioner terkait wawasan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan wawasan keagamaan. Data kemudian diolah dengan metode *clustering*, yaitu dengan mengelompokkan data dan membaginya menjadi kelompok-kelompok data berdasarkan kesamaan data. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis rata-rata (*mean*). Data juga dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk grafik dan naratif.

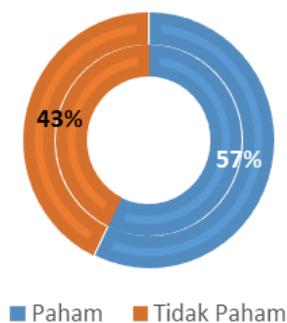
PEMBAHASAN

Hasil survei terhadap 360 mahasiswa yang aktif dalam organisasi baik organisasi internal kampus maupun eksternal kampus pada aspek wawasan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan wawasan keberagamaan adalah sebagai berikut:

Wawasan Moderasi Beragama

Pemahaman moderasi beragama menjadi salah satu hal penting dalam mengantisipasi pola pikir, cara pandang, sikap, dan perilaku yang mengarah kepada radikalisme agama. Pemahaman moderasi beragama harus terus ditingkatkan dan dikuatkan melalui kegiatan penguatan moderasi beragama. Chart berikut ini menunjukkan tingkat pemahaman moderasi beragama mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi baik organisasi internal maupun eksternal kampus di Kalimantan Timur:

PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA



Gambar 1. Chart Pemetaan Pemahaman Moderasi Beragama Mahasiswa Kalimantan Timur

Komposisinya yaitu 206 mahasiswa atau 57% paham terkait

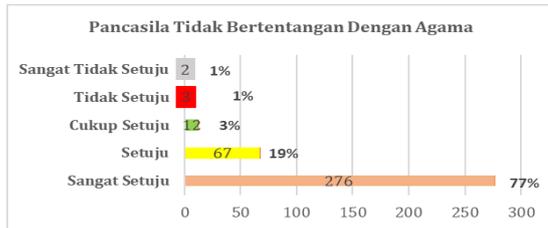
moderasi beragama dan 154 mahasiswa atau 43% belum paham dengan moderasi beragama. Adapun komponen pertanyaan yang diajukan terkait dengan pemahaman moderasi beragama yaitu terkait apa itu moderasi agama, apa saja indikator moderat dalam beragama, apa yang dimaksud ekstremisme beragama, serta apa saja yang menjadi nilai-nilai dalam moderasi beragama.

Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan menjadi bagian penting dari komitmen merawat dan menjaga nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman di Indonesia sebagai negara yang multi agama dan multi etnis yang dibingkai dalam kebhinekaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bersama seluruh elemen anak bangsa dan menjadi landasan untuk mengembangkan semangat kebangsaan dan nasionalisme dengan tujuan mendedikasikan karya terbaik dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini, wawasan kebangsaan mahasiswa di lihat dari tiga indikator pernyataan berikut ini yaitu: 1) Pancasila sudah final dan tidak bertentangan dengan agama; 2) Setiap gerakan sosial-politik-keagamaan yang ingin mengubah Pancasila adalah tindakan *makar*; 3) Semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia tanpa melihat jumlah pemeluknya, mayoritas atau minoritas.

Terkait dengan pernyataan bahwa ideologi Pancasila sudah final

dan tidak bertentangan dengan agama, ditunjukkan dengan diagram berikut ini:



Gambar 2. Grafik Hasil Survei Terkait Pernyataan Pancasila Tidak Bertentangan Dengan Agama

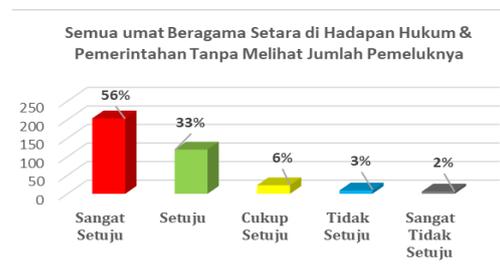
Terdapat 276 responden atau 77% menyatakan sangat setuju bahwa ideologi Pancasila sudah final dan tidak bertentangan dengan agama, 19% atau 67 responden setuju, 3% atau 12 responden menyatakan cukup setuju, 3 responden atau 1% tidak setuju, dan 2 responden atau 1% sangat tidak setuju. Untuk pernyataan kedua, yaitu yang berbunyi setiap gerakan sosial-politik-keagamaan yang ingin merubah Pancasila adalah tindakan makar, maka hasil survei yang didapatkan yaitu yang menyatakan sangat setuju 70% atau 253 responden, 87 responden atau 24% menyatakan setuju, 15 responden atau 4% menyatakan cukup setuju, 3 responden atau 1% menyatakan tidak setuju, dan 1% atau 2 responden menyatakan sangat tidak setuju.



Gambar 3. Diagram Hasil Survei Pernyataan Merubah Pancasila adalah makar

Untuk pernyataan ketiga terkait wawasan kebangsaan yaitu semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia tanpa melihat jumlah pemeluknya, mayoritas atau minoritas, maka didapatkan hasil survei sebagai berikut ini, yaitu 203 responden atau 56% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 33% atau responden menyatakan 119 setuju, 23 responden atau setara dengan 6% menyatakan cukup setuju dan yang menyatakan tidak setuju ada 9 responden atau 3%, dan sangat tidak setuju yaitu 2% .

Berikut ini gambar 4 grafik hasil survei pernyataan semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa melihat jumlah pemeluknya:



Gambar 4. Grafik Hasil Survei Pernyataan Semua Umat Beragama Setara di Hadapan Hukum dan Pemerintahan Tanpa Melihat Jumlah Pemeluknya.

Wawasan Keagamaan

Wawasan keagamaan yang sempit menyebabkan seseorang terjebak pada klaim kebenaran subjektif. Selain itu, akan berdampak pada mudahnya menerima doktrin keagamaan tanpa mempertimbangkan aspek baik dan buruk. Oleh karena itu, perlu untuk terus memberikan pemahaman yang

menyeluruh untuk meningkatkan survei terhadap wawasan keagamaan wawasan keagamaan terutama relasi mahasiswa yang dikaitkan dengan antara umat beragama dan sesama anak kehidupan beragama dan bernegara: bangsa. Berikut ini adalah tabel hasil

Tabel 1. Hasil Survei Wawasan Keagamaan Mahasiswa

NO	INDIKATOR	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	TOTAL
1	Ajaran agama yang murni tidak membolehkan umat agama lain untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari Kepala Desa hingga Presiden di Indonesia	52	66	31	78	133	360
		14%	18%	9%	22%	37%	100%
2	Umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah	26	54	14	184	82	360
		7%	15%	4%	51%	23%	100%
3	Dalam pandangan keagamaan saya yang mendalam, HAM dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama	28	24	4	95	209	360
		8%	7%	1%	26%	58%	100%
4	Dalam pandangan keagamaan saya yang murni, toleransi dan membantu agama lain tidak diperbolehkan, karena berarti menyetujuinya	26	12	24	73	225	360
		7%	3%	7%	20%	63%	100%
5	Dalam pandangan keagamaan saya, negara berdasar agama seharusnya diterapkan untuk Indonesia karena bangsa Indonesia sejak dulu sangat religious	4	23	16	98	219	360
		1%	6%	4%	27%	61%	100%
6	Pemerintah Indonesia bukan aparat keagamaan yang otoritatif, karena itu dalam pandangan keagamaan saya tidak wajib ditaati	2	3	1	116	238	360
		1%	1%	0%	32%	66%	100%
7	Jika ada peluang demokrasi seperti referendum untuk memilih suatu bentuk negara Indonesia, maka saya tentu akan memilih negara berdasar agama sebagai panggilan keimanan saya	2	3	1	92	262	360
		1%	1%	0%	26%	73%	100%
8	Beragama seharusnya berbasis pada tradisi masyarakat di mana agama pertama lahir, tidak boleh berbasis tradisi yang tumbuh di Indonesia	19	36	32	41	232	360
		5%	10%	9%	11%	64%	100%
9	Sikap menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dan layak disesatkan tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama	25	43	54	41	197	360
		7%	12%	15%	11%	55%	100%

Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur harus menjadi mercusuar penguatan moderasi beragama. Mempersiapkan generasi muda dan membekali mahasiswa wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan harus menjadi salah satu prioritas program Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur. Hal ini tentunya dikuatkan dengan hasil pemetaan pemahaman moderasi beragama mahasiswa Kalimantan Timur di atas, dapat dilihat dari beberapa aspek masih ada poin-poin pernyataan yang menggambarkan pola pikir mahasiswa yang mengarah kepada pola pikir eksklusif dan dapat menumbuhkan sikap ekstrem dan radikal dalam beragama. Misalnya terkait dengan aspek penerimaan terhadap budaya dan kearifan lokal, ada total sekitar 5% mahasiswa menyatakan sangat setuju bahwa beragama seharusnya berbasis pada tradisi masyarakat di mana agama pertama lahir, tidak boleh berbasis tradisi yang tumbuh di Indonesia. Adapun 10% menyatakan setuju dan 9% responden menyatakan ragu-ragu. Tentunya pola pikir seperti ini, akan menentang antara agama dan budaya tempat agama tersebut berkembang luas, dan hanya akan mengikuti budaya di mana agama itu pertama lahir, faktanya secara universal agama sangat mengakomodir budaya di mana pun budaya itu ada, tumbuh, dan berkembang selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Terkait dengan pernyataan apakah pandangan keagamaan yang

dianut meyakini bahwa Indonesia harus menjadi negara berdasar agama, karena bangsa Indonesia sejak dulu sangat religius, dalam arti menjadikan Indonesia sebagai negara agama dan bukan negara Pancasila, maka ada sekitar 1% menyatakan sangat setuju, 6% menyatakan setuju, dan 4% menjawab ragu-ragu. Hasil ini menunjukkan bahwa ada potensi sekitar 7% dari mahasiswa yang aktif berorganisasi di Kalimantan Timur yang meragukan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur dan ikut menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, sebagaimana termuat dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya ada referendum dan demokrasi untuk memilih suatu bentuk negara Indonesia, maka ada potensi sekitar 2% responden atau sekitar 6 orang mahasiswa tentu akan memilih negara berdasar agama sebagai panggilan keimanan yang mereka yakini. Selain itu, potensi pola pikir radikal dalam beragama juga tergambar dari pernyataan ke sembilan di mana 12% responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan sikap menyesatkan amalan kelompok yang berbeda dengan kelompok mereka dan perilaku tersebut dianggap tidak bertentangan dengan sikap moderasi dalam beragama, bahkan 7% responden menyatakan sangat setuju. Sekitar 7% atau sekitar 26 mahasiswa sangat setuju bahwa pandangan agama yang dianutnya tidak memperbolehkan untuk toleransi dan membantu agama

lain, karena itu berarti ikut menyetujui agama tersebut. 12 mahasiswa atau sekitar 3% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, dan sekitar 7% atau 24 mahasiswa menyatakan ragu-ragu.

Kaitan dengan tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pandangan keagamaan yang dianut oleh responden, menyatakan bahwa HAM dan demokrasi bertentangan dengan ajaran agama, maka 28 responden atau 8% menyatakan sangat setuju, 24 responden atau 7% menyatakan setuju, dan 1% menyatakan ragu-ragu. Sekitar 22% responden menyatakan umat beragama tidak diperkenankan membantu dan menyediakan tempat ibadah agama lain bila tidak memiliki tempat ibadah. Sekitar 4% menyatakan ragu-ragu. Sekitar 51% menyatakan tidak setuju dan 23% menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Adapun tanggapan responden terhadap pernyataan yang berbunyi ajaran agama yang murni tidak membolehkan umat agama lain untuk menjadi pemimpin publik, mulai dari Kepala Desa hingga Presiden di Indonesia, maka 14% menyatakan sangat setuju, 18% menyatakan setuju, 9% menyatakan ragu-ragu, 22% tidak setuju, dan 37% sangat tidak setuju.

Pemerintah dalam hal ini para *stakeholder* diharapkan mampu memfasilitasi penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa sebagai upaya mengontrol dan mengimbangi arus informasi akibat

masifnya penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana menambah wawasan keagamaan oleh mahasiswa yang ditakutkan memuat ajaran dan doktrin intoleran. Selain itu bisa terus dikampanyekan isu-isu terkait penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi, mengkader agen moderasi beragama di perguruan tinggi sebagai *role model* mahasiswa dan mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama seperti moderasi beragama *award* di kalangan mahasiswa dalam lingkup Perguruan Tinggi. Selain itu sudah seharusnya mahasiswa mampu mengambil peran aktif di masyarakat dalam penguatan moderasi beragama, hal ini harus dimulai dari diri mereka sendiri sebagai bagian dari masyarakat dan agen perubahan. Melindungi dan melayani semua agama dan umat beragama baik dalam pemerintahan, atau dalam berinteraksi sesama anak bangsa juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kewajiban beragama. Selain itu dengan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan yang paripurna yang dimiliki oleh mahasiswa, tentunya kehidupan umat beragama di Indonesia akan terjaga dalam bingkai kebhinekaan.

PENUTUP

Potret moderasi beragama di kalangan mahasiswa di Kalimantan Timur tergambar pada aspek wawasan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan wawasan keagamaan. Komposisinya yaitu 57% mahasiswa

yang aktif dalam berorganisasi paham terkait moderasi beragama dan 43% belum paham dengan moderasi beragama. Dalam aspek wawasan kebangsaan pada pernyataan pertama, 77% menyatakan sangat setuju bahwa ideologi Pancasila sudah final dan tidak bertentangan dengan agama, 19% menyatakan setuju, 3% menyatakan cukup setuju, 1% tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju. Untuk pernyataan kedua yaitu setiap gerakan sosial-politik-keagamaan yang ingin merubah Pancasila adalah tindakan makar, maka yang menyatakan sangat setuju 70%, 24% menyatakan setuju, 4% menyatakan cukup setuju, 1% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Untuk pernyataan ketiga terkait wawasan kebangsaan yaitu semua umat beragama setara di hadapan hukum dan pemerintahan Indonesia tanpa melihat jumlah pemeluknya, mayoritas atau minoritas, maka 56% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 33% menyatakan setuju, 6% menyatakan cukup setuju dan yang menyatakan tidak setuju 3%, dan sangat tidak setuju 2%. terkait wawasan keagamaan di kalangan aktivis mahasiswa yang aktif berorganisasi masih ditemukan pola pikir yang mengarah kepada pola pikir eksklusif dan dapat menumbuhkan sikap ekstrem dan radikal dalam beragama terutama dalam aspek wawasan keberagaman yang meliputi penerimaan terhadap budaya, dan mudah menyesatkan amalan keagamaan yang berbeda dari

amalannya. Pemerintah dalam hal ini para *stakeholder* diharapkan mampu memfasilitasi penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya untuk mencegah lahirnya pola pikir, sikap, dan perilaku yang mengarah kepada radikalisme agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian ini. Terlebih kami ucapkan terima kasih kepada pihak Balitbang Agama Makassar yang telah memberikan bimbingan penulisan, sehingga artikel ini dapat diperbaiki dan menjadi layak untuk dibaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rubaidi. (2007). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama' masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pusaka.
- Ali Maksum. (2011). Pluralisme dan Multikulturalisme; Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia. In *Pluralisme dan Multikulturalisme; Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*.
- Aslam, M. M. B. M., & Gunaratna, R. (2019). Terrorist rehabilitation and community engagement in Malaysia and Southeast Asia. In *Terrorist Rehabilitation and Community Engagement in Malaysia and Southeast Asia*.

- <https://doi.org/10.4324/9780367817466>
- Azca, M. N. (2013). Yang Muda, Yang Radikal Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru. *Maarif*, 8(1).
- Azra, A. (2003). Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the myths. In *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. https://doi.org/10.1142/9789812561749_0002
- Basri, B., & Dwiningrum, N. R. (2019). Potensi Radikalisme di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Politeknik Negeri Balikpapan). *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.546>
- Depdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*, 2(Jakarta).
- Erikson, E. (1968). Youth: Identity and crisis. In *New York, NY: WW* (Issue 96).
- Eunike, P., & Putrawan, B. K. (2021). Membangun Toleransi Antar Umat Beragama Sebagai Tanggung Jawab Sosial Kehidupan Kekristenan di Era Pandemi Covid 19: Studi Kasus Masyarakat Rusunawa Rawabebek. *Pusaka*, 9(2). <https://doi.org/10.31969/pusaka.v9i2.527>
- Gillum, R. M. (2018). Muslims in a post-9/11 America: A survey of attitudes and beliefs and their implications for U.S. national security policy. In *Muslims in a Post-9/11 America: A Survey of Attitudes and Beliefs and Their Implications for U.S. National Security Policy*.
- Hadiz, V. R. (2016). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. In *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316402382>
- Hadziq, A. (2019). Nasionalisme Organisasi Mahasiswa Islam dalam Menangkal Radikalisme di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 4(1). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2019.vol4\(1\).2791](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2019.vol4(1).2791)
- Harun Nasution. (1992). *Theologi Islam*. UII press.
- Idham. (2019). *Moderasi dalam Budaya Masyarakat Islam*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Irwan Masduqi. (2012). *BerIslam Secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Mizan.
- Kamali, Hashim, M. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. Oxford University Press.
- Kartodirjo, S. (1985). *Ratu Adil*. Sinar Harapan.
- Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama. (2021). *Konsep Moderasi Beragama Kemenag Dalam Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama*.

- Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). "Moderasi Beragama." Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Mc. Cullough and Timothy Smith. (2003). *Religion and Health: Depressive Symptoms and Mortality as Case Studies*. Cambridge University Press.
- Menchik, J. (2016). Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism. In *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316344446>
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Rahimi Sabirin. (2004). *Islam & Radikalisme*. Ar Rasyid.
- Saifuddin. (2017). Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1).
- Sukma, R. (2005). Ethnic conflict in Indonesia: Causes and the quest for a solution. In *Ethnic Conflicts in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1355/9789812305565-004>
- Syafii, A., Jeffrie, M., Rizal, G., Pemimpin, S., Fajar, U., Ul, R., Pemimpin, H., Ahmad, R., Fanani, F., Pemimpin, W., Abdullah, M., Dewan, D., Clara, R., Amin, J. M., Nashir, A. H., Assyaukanie, L., Permata, A.-N., Latief, H., Najib, A., ... Redaksi, A. (2013). Menghalau Radikalisasi Kaum Muda : Gagasan dan Aksi. *Maarif, I*(Arus Pemikiran Islam dan Sosial).
- Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). Radikalisme Agama di Indonesia. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Yusuf, A. (2018). Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, Dan Tasawuf). *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 203.